

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL</b></p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi,  <p style="text-align: center;"><b>Dr. NOOR HALIM, S.PD., M.PD</b> Pembina Tingkat I NIP. 19690702 199512 1 003</p>
<b>DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>	Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang	<b>Evaluasi Penetapan Kinerja Satuan Organisasi/Kerja</b>
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian</li> <li>2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang</li> <li>3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin</li> <li>5 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian</li> <li>6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan</li> <li>7 Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian,</li> <li>8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial</li> <li>9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak,</li> <li>10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> <li>11 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah</li> <li>12 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang</li> <li>13 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>14 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013</li> <li>Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan mengenai Penyelenggaraan Izin PUB/ UGB;</li> <li>2. Memiliki pemahaman tentang Evaluasi Penyelenggaraan Izin PUB/ UGB;</li> <li>3. Memiliki kemampuan Mengevaluasi Penyelenggaraan Izin PUB/ UGB.</li> </ol>	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Surat Masuk</li> <li>2. SOP Pelaksanaan survey Penetapan Rekomendasi Izin PUB/ UGB</li> <li>3. SOP Surat Keluar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceklis Izin Rekomendasi PUB/ UGB;</li> <li>2. Pedoman Penetapan Surat Izin Rekomendasi PUB/ UGB;</li> <li>3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya</li> </ol>	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila dokumen Pemohon Rekomendasi Izin PUB/ UGB tidak lengkap maka evaluasi tidak dapat dilakukan.	Buku Dokumentasi Hasil Evaluasi Penetapan Surat Izin Rekomendasi PUB/ UGB.	